



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Maret 2023/Periodik - 2022)

**BIDANG** : BUMN/BUMD  
**LEMBAGA** : PT PEMBANGUNAN PERUMAHAN (PERSERO)  
**UNIT KERJA** : WAKIL PIMPINAN

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **SINUR LINDA GUSTINA MANURUNG**
2. Jabatan : **DIREKTUR STRATEGI KORPORASI DAN PENGELOLAAN KAPITAL MANUSIA**
3. NHK : **647447**

**II. DATA HARTA****A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 5.115.067.739

1. Tanah dan Bangunan Seluas 162 m<sup>2</sup>/40 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 128 m<sup>2</sup>/38 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m<sup>2</sup>/85 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 277.500.000
4. Bangunan Seluas 21 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA KOTA BEKASI , HASIL SENDIRI Rp. 283.665.459
5. Bangunan Seluas 21 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 468.576.500
6. Bangunan Seluas 44 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 436.325.780
7. Tanah dan Bangunan Seluas 50 m<sup>2</sup>/100 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000
8. Tanah Seluas 669 m<sup>2</sup> di KAB / KOTA MANGGARAI BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 699.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. ----

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

Rp. 781.180.000

**D. SURAT BERHARGA**

Rp. 1.275.227.400

**E. KAS DAN SETARA KAS**

Rp. 5.392.183.650

**F. HARTA LAINNYA**

Rp. 500.000.000

**Sub Total**

Rp. 13.063.658.789



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 13.063.658.789

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.